

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang membentang luas dari Sabang sampai Marauke. Keluasan wilayah ini menjadikan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan budaya. Berbagai macam budaya dan tradisi hidup berkembang pada masing-masing suku bangsa yang tersebar di nusantara. Keluasan wilayah tersebut telah membentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki struktur sosial yang bersifat non komplementer. Sejak negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai era reformasi saat ini dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia, negara kita dalam menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan demokrasi dibagi dalam empat masa. Pertama, masa Republik Indonesia I (1945-1959) atau yang lebih dikenal dengan era Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer. Kedua, masa Republik Indonesia II (1959-1965) atau yang lebih dikenal dengan era Orde Lama atau Demokrasi Terpimpin. Ketiga, masa Republik Indonesia III (1965-1998) atau yang lebih dikenal dengan era Orde Baru atau Demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir yang berlaku sampai saat ini adalah masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) atau yang lebih dikenal dengan era Reformasi.

Adalah menjadi hal yang sangat menarik ketika penulis mendapati fenomena yang kini menjadi unik di tengah hiruk pikuk modernisasi dimana

suatu komunitas yang sangat kuat memegang prinsip-prinsip agama Islam, bahkan bisa dikatakan sebagai muslim ortodok. Kelompok ini disebut sebagai masyarakat santri. Santri di identikan sebagai masyarakat yang belajar ilmu agama di pondok pesantren yang dipimpin oleh ulama atau kiai. Keberadaan pesantren merupakan entitas sosial bahkan politik karena keberadaan yang demikian tidak jarang pesantren merupakan salah satu pihak yang harus didekati ketika sebuah kebijakan pemerintah akan digulirkan.¹

Untuk memahami realitas sistem politik Indonesia tidak akan terlepas dari peranan budaya politik yang dikonsepsikan sebagai basic yang dapat mempengaruhi terhadap perilaku politik masyarakat karena politik mempunyai refleksi pada pelebagaan politik bahkan pada proses politik yang ada di Indonesia, dan dengan demikian pembangunan politik di Indonesia dapat pula diukur berdasarkan keseimbangan dan harmoni yang dicapai oleh pelaku politik dengan pelebagaan politik yang ada.

Dalam masa berlangsungnya perubahan sosio-kultural harus dapat diperhitungkan sebagai tekanan budaya politik dalam sistem politik di Indonesia yang di tandai dengan penemuan-penemuan baru dalam elemen pembentukan konfigurasi melalui konstelasi (melihat gejala atau tanda pada suatu peristiwa), sementara budaya politik di Indonesia dapat dilihat melalui, *Pertama*: adanya konfigurasi sub-kulturul masyarakat yang sangat heterogen dan plural. *Kedua*: budaya masyarakat Indonesia yang bersifat parochial dan subjektif di satu pihak dan bersifat participant di pihak lain. *Ketiga*: sifat ikatan

¹ Hamdan Farchan S, *Titik Tengkar Pesantren* (Yogyakarta : Pilar Religia, 2005) Hal : 64.

yang bersifat primordial yang sangat kuat dan masih mengakar dalam budaya politik masyarakat Indonesia yang dikenal melalui indikatornya berupa sentiment-sentiment kedaerahan, agama, kesukuan serta bentuk sentiment-sentiment yang lain. *Keempat*: kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengakui sikap paternalisme dan patrimonial. *Kelima*: dilema interaksi dengan modernisasi dengan pola yang telah lama mengakar sebagai tradisi dalam masyarakat Indonesia yang plural.² Dalam sistem sosial bangsa Indonesia yang sangat plural dan heterogen, umat Islam dan khususnya santri merupakan salah satu aset bangsa yang mempunyai hak yang sama sebagai warga yang ikut berjuang mendirikan kemerdekaan negara Republik Indonesia.

Posisi politik dalam perjuangan umat Islam bergeser dengan munculnya gerakan dakwah sebagai alternatif gerakan politik dalam realisasi perjuangan Islam. Perkembangan baru tersebut mendorong timbulnya perkembangan pemikiran politik dikalangan kaum muda santri. Pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan negara Indonesia, kelompok santri banyak berkecimpung dalam ranah politik. Hampir disetiap lembaga sosial keagamaan yang ada di Indonesia ikut berpartisipasi dalam masalah politik. Lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU yang mempunyai puluhan juta warga serta mempunyai jutaan santri dan kiai ikut serta dalam perjuangan bangsa Indonesia dan persoalan politik. Hal ini dibuktikan dengan masuknya kelompok ini kedalam partai politik dan ikut dalam pertarungan politik pada tahun 1955.

² Rusadi Kartaprawira, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung : PT Sinar Baru, 1998) Hal: 39

Mulai tahun tersebut, banyak organisasi kemasyarakatan dan kelompok Islam lain baik yang modernis, fundamentalis maupun tradisional bertarung untuk memperoleh dukungan masa untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam khususnya dan kepentingan bangsa pada umumnya. Akan tetapi jauh sebelum itu Partai Islam pertama yang ada di Indonesia sebelum kemerdekaan adalah Sarekat Islam (SI)³ berdiri pada tanggal 11 Nopember 1912 di Solo, berasal dari organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhudi pada tahun 1911. Partai ini telah berulang kali berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) dan dibawah elit partai Tjokroaminoto, Abdul Moeis dan Agus Salim, partai ini memperoleh kejayaan pada tahun 1916 hingga 1921 dengan bertambahnya pendukung. Pada tahun 1930 PSI berganti nama kembali menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) sebelum pada akhirnya muncul secara politis sebagai partai yang kokoh di bawah bendera Partai Masyumi. Berbagai pergantian nama partai tersebut terjadi pada masa kolonial Belanda. Ini memperlihatkan adanya ruang bagi kalangan terdidik pribumi yang sekolah di dalam dan di luar negeri untuk memperjuangkan kepentingan dengan berdasarkan asas yang sama yaitu Islam.

Pada masa pemerintahan Jepang, mulai 20 Nopember 1943 segala aktifitas pribumi termasuk rapat tidak diperbolehkan. Aktifitas yang ada hanya organisasi yang memobilisasi masa dalam rangka tiga A. Kemudian disusul dengan organisasi-organisasi massa yang berasaskan Islam seperti

³ Dadan Wildan, *Yang Da'I Yang Politikus* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1997) Hal : 6

Muhammadiyah (modernis) dan NU (tradisionalis)⁴ ditahun berikutnya dan juga Perserikatan Umat Islam di Majelengka dan Persatuan Islam di Sukabumi tahun 1945.⁵

Tiga bulan setelah kemerdekaan, Majelis Syuro Muslimin Indonesia didirikan pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta⁶ atau disebut juga Partai Masyumi sebagai partai politik dari gabungan dan dukungan beberapa organisasi besar yang berasaskan Islam. Masyumi lahir sebagai pendorong pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ini didasarkan pada jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Islam sehingga dianggap sebagai lahan subur bagi Masyumi untuk memenangkan pemilu melalui demokrasi. Untuk mempersiapkan hal tersebut, Masyumi kemudian membentuk anak organisasi profesi yang terdiri dari Serikat Buruh Islam Indonesia (STII), dan Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII). Khusus untuk kaum perempuan terdapat Muslimat Masyumi. Sedangkan untuk kelompok independen mahasiswa Masyumi memiliki pendukung yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), dan Pemuda Islam Indonesia. Partai-partai Islam setelah merdeka selain Masyumi adalah Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) yang keluar dari Masyumi tahun 1947, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan Nahdlatul Ulama (NU) yang keluar dari Masyumi tahun 1952.⁷

⁴ Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Bandung : Teraju, 2003) Hal : 119

⁵ *Ibid.* Hal : 31

⁶ Abdul Sani, *Lintas Sejarah Pemikiran, Perkembangan modern Dalam Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1998) Hal : 227

⁷ Badri Yatim, *sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006) Hal : 267.

Penyatuan beberapa organisasi yang berasaskan Islam menjadikan Masyumi sebagai partai Islam yang kuat dan pernah menjadi pemenang pertama diantara partai Islam lain dalam pemilu sebelum pada akhirnya terjadi disintegrasi yang mengakibatkan perpecahan. Partai-partai pendukung Masyumi lalu membentuk partai-partai tersendiri yang kemudian menjadi peserta pemilu. Pada awal pemilu dilaksanakan tahun 1955 hingga 2014, lembaga keagamaan umat Islam tetap berkecimpung kedalam politik praktis dengan ikut bagian mendirikan atau mendukung partai politik.

Penjelasan politik kepartaian dan dukungan terhadap partai politik di Tanah Air sering masih tertumpu pada perspektif lama : politik aliran. Dalam perspektif ini, agama Islam-santri versus kebangsaan-sekuler, dipercaya merupakan faktor penting yang menentukan kenapa seorang warga negara memilih partai politik tertentu.

Dengan mengamati perilaku sosio-kultural di sebuah pedesaan atau sebuah kota kecil, mereka secara imajinatif mengkonstruksi pola pengelompokan politik misalnya kita ambil di daerah pulau Jawa yang merupakan wilayah penduduk paling padat di tanah air. Pertanyaannya adalah, sejauh mana retorika politik aliran tersebut masih relevan secara empiris setelah kurang-lebih 50 tahun politik Indonesia berjalan, setelah terjadi perubahan politik kepartaian, terutama sejak Orde Baru? Disamping itu, apakah tidak terjadi perubahan orientasi keagamaan dalam masyarakat muslim itu sendiri sehingga pengaruh agama / aliran terhadap dukungan pada partai politik juga mengalami perubahan.

Kalau studi politik aliran masih relevan, meningkatnya religiositas muslim Indonesia pada umumnya seharusnya memperkuat partai-partai Islam. Tapi kenyataannya tidak demikian. Malah sebaliknya, sehingga partai-partai yang secara eksplisit menyatakan diri sebagai partai Islam hanya mendapat sekitar 6 persen suara. Ini berarti bahwa meningkatnya religiositas muslim di tanah air tidak punya dampak besar terhadap politik kepartaian di tanah air.

Kekuatan utama yang membuat menguatnya santrinisasi yang tidak signifikan terhadap penguatan partai Islam adalah terjadinya perubahan politik kepartaian yang menetralisasi dampak dari menguatnya santrinisasi tersebut : munculnya partai-partai.

Partai-partai sekuler mampu menyerap kalangan umat Islam sehingga dikotomi santri-sekuler menjadi cair dan tidak signifikan dalam partai ini. Pencairan ini dilakukan partai sekuler selama lebih dari 30 tahun dan karena itu cukup mengakar di masyarakat. Sementara itu peran partai Islam adalah membelokan orientasi politik santri lama dari politik Islam ke politik sekuler sehingga religiositas konstituen kedua partai ini menjadi tidak signifikan dalam pembentukan politik aliran. Pada awalnya kelompok Islam khususnya kaum santri mendapatkan kepercayaan besar dari rakyat Indonesia. Mungkin harapan para rakyat adalah agar dapat terpilihnya seorang wakil yang amanah, mungkin saja bertipikal delegate, wakil yang bertipikal ini memberikan suaranya atas dasar keinginan pemilihnya. Setidaknya mayoritas dari mereka partisan trustee.⁸ Berkecimpungnya para kiai dan politisi Islam dalam dunia politik praktis

⁸ PlaCid's & Kid, *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan Publik* (Malang : Averroes Press, 2006) Hal : 65.

ternyata tidak menjadikan umat Islam semakin maju dan sejahtera serta tidak dapat memperjuangkan politik Islam, akan tetapi malah justru sebaliknya umat Islam khususnya santri hanya dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan.

Era reformasi adalah era kebangkitan politik nasional maupun politik umat Islam yang sudah lama membisu karena adanya tekanan politik dari penguasa orde baru. Munculnya berbagai macam organisasi sosial politik Islam ikut mewarnai semaraknya era reformasi. Reformasi yang menawarkan aroma kebebasan menjadikan ideologi Pancasila yang menjadi ikon orde baru. Perpolitikan nasional kembali diramaikan dengan berbagai ideologi politik yang berbeda seperti masa pemerintahan orde lama. Partai-partai nasionalis dan partai-partai Islam kembali bertarung untuk mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Banyak media politik yang partai politik lakukan agar mendapat dukungan dari rakyat, seperti halnya media yang mereka gunakan adalah lewat saluran massa yaitu lewat komunikasi politik media massa baik itu melalui media elektronik maupun media cetak, propaganda, periklanan dan retorika. *Interpersonal* yaitu komunikasi politik melalui pengaruh pribadi sebagai publik figur dan organisasi.

Secara anatomi, partai Islam itu mewakili tiga aliran Islam yang berkembang di Indonesia, yaitu kelompok Islam tradisional (PKB dan PPP), Islam modernis (PAN dan PBB), serta generasi Islam baru (PKS). Munculnya partai-partai yang didirikan oleh umat Islam menjadi bukti bangkitnya kekuatan politik santri dalam percaturan perpolitikan nasional.

Pada masa reformasi tokoh Islam berjaya dalam percaturan politik praktis dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke-4 secara demokratis dan konstitusional, juga terpilihnya Amien Rais sebagai ketua MPR RI, dan terpilihnya Akbar Tanjung sebagai ketua DPR RI. Terpilihnya ketiga tokoh yang berbasis santri dalam lembaga tinggi negara tersebut mengindikasikan bahwa politik Islam telah kembali dalam percaturan politik nasional Indonesia.

Keberhasilan Abdurrahman Wahid yang tak lain mantan ketua PBNU dan PKB sebagai Presiden RI setelah menyingkirkan Megawati Soekarno Putri seakan menjadi momentum bagi politik Islam untuk memegang kendali politik nasional, apalagi ketua MPR RI juga dipegang oleh mantan ketua PP Muhammadiyah dan PAN yaitu Amien Rais, serta ketua DPR RI oleh mantan ketua PBHMI Akbar Tanjung. Ini sebagai indikasi kemenangan politik Islam era reformasi. Pada pemilu legislatif 2004, tokoh-tokoh yang duduk dikursi kepemimpinan juga masih dari kalangan santri yaitu terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI ke-6 yang mana adalah mantan santri, serta ketua MPR RI Hidayat Nurwahid yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera.

Keberadaan santri tidak jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, kebanyakan santri yang nyantri di pondok pesantren juga dijadikan komoditas politik oleh kiainya untuk mendukung salah satu partai politik yang memberikan keuntungan materi maupun spiritual kepada kiai. Santri yang

belum punya kepentingan politik hanya menuruti apa yang menjadi pilihan politik dari kiainya.

Fenomena tersebut juga terjadi di setiap menjelang pemilihan umum legislatif secara langsung, yaitu kiai terlibat aksi dukung mendukung salah satu partai politik dan calon legislatif yang kemudian diikuti oleh para santrinya. Fenomena seperti ini sering terjadi pada setiap pesantren di seluruh Indonesia tidak terkecuali pondok pesantren krapyak Yogyakarta, santri di sana banyak juga yang mengikuti kehendak politik kiainya. Pada zaman orde baru, kiai pondok pesantren Al-Munawwir krapyak mendukung partai PPP yang mana di amini oleh seluruh santrinya, sedangkan pada era reformasi dukungan terhadap partai politik terpecah menjadi dua kubu yakni pondok pesantren Ali Maksum Krapyak masih konsisten dengan pilihan lamanya serta ada juga kiai dari pondok pesantren Al-Munawwir yang berlabuh dan mendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mana pilihan kiai ini tetap di ikuti oleh santrinya masing-masing kubu.

Pada pemilu 2009 ada perubahan pilihan politik pada diri kiai pondok Ali Maksum dan pondok Al-Munawwir yakni pondok Ali Maksum menjatuhkan pilihan partai politiknya kepada partai Demokrat karena alasan ketua umum partai Demokrat anak menantu dari kiai Ali Maksum, sedangkan kiai pondok Al-Munawwir keluar dari PKB dengan alasan sudah tidak sejalan ideologi antara para kiai pondok pesantren Al-Munawwir dengan Gus Dur serta menjatuhkan pilihan partai politiknya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Pada pemilu 2014 terjadi penurunan suara santri pada pemilu

legislatif, yang mereka lakukan hanya mengkritisi tapi tidak melakukan tindakan riil untuk merubah kepada kemajuan Indonesia. Karena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat santri terhadap pelaku politik yang berimbas kepada menurunnya jumlah suara mereka dalam memilih partai politik.

Pada pemilu tahun 2014 tidak ada geliat aktifitas politik di pondok pesantren Al-Munawwir tersebut dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan aktifitas dan suara santri dalam pemilu, di antaranya adalah faktor teknis dan faktor non teknis. *Faktor teknis*, karena tidak adanya anjuran dari para kiai kepada santri untuk memilih partai politik dan juga para santri sekarang ini sudah berfikir secara rasional dalam pilihan politiknya, juga karena bentuk solidaritas kepada pesantren Ali Maksum yang terkena musibah ditahannya Anas Urbaningrum dalam kasus tindak pidana korupsi maka pondok pesantren Al-Munawwir mengambil sikap netral dalam pemilu 2014, dan pada tahun ini pula kiai besar Zainal Abidin meninggal dunia, ini seperti pondok pesantren Al-Munawwir kehilangan seorang tokoh panutan yang selalu menjadi rujukan para santri dalam menentukan sikap politiknya. *Faktor non teknis*, karena tidak ada pendataan dari KPUD Yogyakarta maka seluruh santri yang sudah cukup umur untuk memilih tidak dapat melakukan pemilu. Budaya seperti ini menurut hemat penulis perlu dikaji lebih lanjut agar dapat mengetahui secara mendetail dan secara ilmiah mengapa para santri cenderung mengikuti pilihan politik dari kiainya, padahal penulis yang notabene adalah mantan santri juga di krapyak melihat para santri ini memiliki jiwa kritis, aktifis akademis dan penulis juga yakin para santri ini juga memiliki ideologis yang tinggi, juga ada sifat

egois yang tidak mau terpengaruh oleh ajakan orang, tetapi mengapa mereka manut sekali bila para kiai yang menyuruh mereka.

Fenomena seperti ini menurut penulis tidak sesuai dengan sejarah perjalanan politik pondok pesantren Al-Munawwir dari dulu hingga tahun 2009 yang selalu ada geliat politik didalam tubuh pondok itu sendiri baik itu para kiai atau santrinya sendiri. Maka dari itu penulis ingin mempelajari faktor apa saja yang menyebabkan **MENURUNNYA SUARA POLITIK SANTRI DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014 DIPONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR**. Santri adalah kaum muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan nasional di masa yang akan datang. Seharusnya santri mempunyai kepedulian yang mendalam dalam urusan politik dan netral dalam menentukan hak politiknya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka untuk memperkuat argumen dapat di rumuskan Mengapa Suara Politik Santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir Dalam Pemilu Legislatif Mengalami Penurunan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Studi ini sebenarnya tidak terlalu ambisius untuk melempar kritik terhadap pola politik dikalangan pondok pesantren akan tetapi tidak lebih dari

eksentiasi penulis untuk sedikit mengungkap realita sosial dunia santri sebagaimana yang telah diperdebatkan dalam dunia pesantren.

Adapun tujuan penelitian ini untuk pemecahan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat jangka pendek, karena hasil penelitian tersebut lebih menekankan pada upaya pemecahan suatu permasalahan secara praktis (*practical approach*).⁹

Penelitian ini mengambil populasi masyarakat santri di pondok pesantren Krapyak yang terletak di Dusun Krapyak Kulon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Yogyakarta yang mana dengan pertimbangan *Pertama*, penulis adalah bagian dari komunitas ini secara kebetulan sedikit banyak telah mengetahui lingkungan sosial kasus. Kendatipun demikian penulis sadar bahwa menjaga jarak dengan populasi adalah sangat dibutuhkan agar tidak terjebak kedalam subjektivitas. *Kedua*, penulis merasakan adanya keunikan yang terjadi dalam masyarakat santri ini, seperti lembaga-lembaga keagamaan yang tidak ditemui di daerah lain atau dengan kata lain penelitian yang sederhana ini akan berupaya mengungkap secara detil tentang :

- a. Bentuk dan pola interaksi masyarakat santri.
- b. Strategi politik santri.
- c. Partisipasi politik santri

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian, Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003) Hal : 7.

- a. Sebagai sumbangan bagi kelengkapan data dalam upaya pengkajian selanjutnya yang berkaitan dengan kehidupan politik santri.
- b. Untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam pemerintahan berdasarkan kesadaran sendiri guna mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam sistem politik demokratis, budaya politik yang semestinya ditumbuhkan kembangkan warga negara adalah budaya politik partisipatif. Budaya politik partisipatif ini dapat berupa sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya yang dapat menopang terwujudnya partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dilakukan dengan cara konvensional dan cara non-konvensional.

Partisipasi politik yang dilakukan dengan cara-cara *konvensional* seperti:

- a. Memberikan suara dalam pemilu,
- b. Terlibat dalam kampanye,
- c. Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan,
- d. Melakukan diskusi publik, dan
- e. Melakukan komunikasi pribadi dengan aktivis politik atau pejabat pemerintah.

Partisipasi politik yang dilakukan dengan cara *non-konvensional* dapat berbentuk:

- a. Demonstrasi,
- b. Boikot, dan
- c. Pembangkangan sipil.

Tipe partisipasi politik meliputi:

- a. Partisipasi aktif: partisipasi aktif merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah.
- b. Partisipasi Militan-Radikal: partisipasi militan-radikal merupakan kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap kebijakan pemerintah, namun cenderung mengutamakan cara-cara non-konvensional, termasuk di dalamnya menggunakan cara-cara kekerasan.
- c. Partisipasi Pasif: Partisipasi pasif adalah kegiatan warga negara yang menerima atau menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Jadi, partisipasi pasif cenderung tidak mempersoalkan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah.
- d. Perilaku Apatitis: perilaku apatis adalah kegiatan warga negara yang tak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang ada.

Ada berbagai bentuk partisipasi politik, hal itu bisa dibedakan berdasarkan; jumlah pelaku, keterlibatan si pelaku, wujud sumbangan yang diberikan, dan jenis-jenis pelaku. Berdasarkan jumlah pelaku, bentuk partisipasi politik bisa dibedakan menjadi:

- a. **Partisipasi Individual:** partisipasi individual adalah kegiatan warga negara biasa yang mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh orang-perorangan.
- b. **Partisipasi Kolektif:** partisipasi kolektif adalah kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan oleh sejumlah orang atau banyak orang.

Berdasarkan keterlibatan si pelaku, partisipasi politik bisa dibedakan menjadi:

- a. **Partisipasi Langsung:** partisipasi langsung adalah kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah, yang dilakukan sendiri tanpa perantara pihak lain.
- b. **Partisipasi tak Langsung:** partisipasi tak langsung adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah, yang dilakukan dengan perantara pihak lain.

Berdasarkan wujud sumbangan yang diberikan, partisipasi politik bisa dibedakan:

- a. **Partisipasi Material:** partisipasi material adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah, dengan cara memberikan sumbangan materi.

- b. **Partisipasi Non-Material:** partisipasi non-material adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara memberikan sumbangan non-materi.

Berdasarkan jenis-jenis perilakunya, partisipasi politik bisa dibedakan:

- a. **Kegiatan Pemilihan:** kegiatan pemilihan adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara melakukan berbagai kegiatan untuk mempengaruhi hasil Pemilu/Pilkada.
- b. **Lobbying:** lobbying adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah yang dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak tertentu (pejabat/tokoh).
- c. **Kegiatan Organisasi:** kegiatan organisasi adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara menjadi anggota organisasi tertentu.
- d. **Mencari koneksi:** Mencari koneksi adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pemerintah dengan cara menghubungi orang-orang tertentu untuk memperoleh keuntungan tertentu bagi satu atau beberapa orang.

2. Pemilu Legislatif

Caleg atau Calon legislatif adalah orang yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem Presidential, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang. Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan, dengan peserta pemilu adalah partai politik. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota DPR, bukan partai politik).¹⁰

3. Pesantren

Pesantren adalah lembaga local yang mengajarkan praktik-praktik dan kepercayaan-kepercayaan Islam.¹¹ Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, ia telah hidup melalui berbagai macam pancaroba sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di nusantara; mulai dari masa pra-kolonial, periode kolonial, hingga kemerdekaan. Lembaga ini menjadi saksi bisu bagi 2 hal penting, yaitu perkembangan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan

¹⁰ <http://brainly.co.id/tugas/1232799>

¹¹ Ronald Alan Lukens-Bull, *Jihad Ala Pesantren* (Yogyakarta : Gama Media, 2004) Hal : 56

pertumbuhan islam sebagai agama yang di anut oleh bagian terbesar penduduk nusantara. Dalam kerangka pertama pesantren turut memberi sumbangan penting bagi terbangunnya nasionalisme indonesia awal. Gerakan-gerakan proto-nasionalis yang dimulai bertumbuh sejak abad ke-18 banyak berhimpun di seputar pesantren dan guru-guru agama Islam.

Menurut Zamakhsyari Dhofier, pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islma tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Asrama untuk para siswa tersebut berada dalam lingkungan komplek pesantren dimana kiai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah.¹²

Pengaruh masyarakat santri terhadap masyarakat Indonesia masih kuat, baik dalam peran pesantren sebagai pusat tarekat maupun pendidikan anak-anak. Pesantren bukan semata-mata sebagai sebuah institusi pendidikan saja. Sejak kemunculannya, pesantren muncul sebagai sebuah institusi yang telah berakar kuat di dalam masyarakat Indonesia. Pesantren merupakan produk dari sistem pendidikan pribumi yang memiliki akar sejarah, budaya dan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, pesantren merepresentasikan pendidikan yang unik yang mensintesakan dimensi sosial, budaya dan agama. Akar dan sintesis ini kemudian mempengaruhi fungsi pesantren baik secara internal maupun eksternal. Pesantren muncul sebagai sebuah komunitas kehidupan yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas kreatif yang

¹² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta : LP3ES, 1985) Hal : 44

menggunakan pendidikan alternatif yang menggabungkan pendidikan dan pengajaran dengan pembangunan komunitas.

Kata santri dapat diartikan sebagai masyarakat Islam yang belajar bersama dan menjalani hidup bersama pula. Santri juga dapat diartikan sebagai manusia yang mencari pengetahuan keagamaan dengan cara berpertualang dari pesantren ke pesantren yang lain. Selain menetap, santri tidak meninggalkan pesantren begitu saja sampai kiai dapat memberikan pandangan yang baru dan sudah memperoleh pengetahuan yang cukup dari pesantren tersebut.

Adapun menurut Clifford Greetz, santri memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti sempit adalah seorang pelajar sekolah agama yang disebut pondok pesantren, sedangkan dalam arti luas adalah seseorang yang menganut agama Islam dengan sungguh-sungguh serta pergi ke masjid pada hari jum'at untuk sembahyang dan sebagainya. Kaum santri lanjut Greetz juga diartikan sebagai kelompok orang yang beragama Islam secara sungguh-sungguh menjalankan syari'at Islam yang belum tercampur oleh tradisi apapun.¹³

Serta santri juga merupakan ciri yang melekat di pondok pesantren, tanpa santri sebuah lembaga pendidikan tidak disebut pesantren. Keberadaan santri menjadi modal sosial bagi masyarakat pesantren, ia akan menjadi penerus syi'ar Islam. Benteng ilmu keagamaan yang dalam akan memiliki santri, berbagai disiplin ilmu menjadi kajian spesifik pesantren : ilmu falak, faraidl, gramatika bahsa arab (nahwu, sharaf dan balagah), mantiq, ulumul Qur'an dan sebagainya. Pesantren dalam terminologi keagamaan merupakan institusi

¹³ Clifford Greetz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta : PT Pustaka Raya, 1989) Hal 4.

pendidikan Islam, yang mana didalamnya terdapat kiai, santri, asrama, masjid dan sistem pendidikan.

Santri yang terdiri dari anak-anak sampai orang tua adalah orang yang di asingkan dari keakraban keluarga oleh orang tuanya kedalam suatu hubungan sosial yang baru, metamorpose dari anak yang selalu bergantung pada orang lain menjadi orang dewasa yang bebas. Untuk mendewasakan anak tersebut biasanya para orang tua menyerahkan kepada seorang kiai untuk dididik ilmu keagamaan sebagai bekal hidup. Di pondok pesantren tersebut, santri diasuh oleh para kiai yang mengambil alih peran lanjutan dari orang tua. Kiai menjadi guru sekaligus pemimpin rohaniah keagamaan serta tanggung jawab untuk perkembangan kepribadian maupun kesehatan santrinya.

Adapun kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. "Kiai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren". Sebutan kiai sangat populer digunakan di kalangan komunitas santri. Kiai merupakan elemen sentral dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kiai yang menjadi penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga karena sosok kiai merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan komunitas santri. Kedudukan dan pengaruh kiai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi kiai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-

nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas, tawadhu', dan orientasi kepada kehidupan ukhrowi untuk mencapai riyadhah.¹⁴

Kemashyuran atau keterkenalan pesantren biasanya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan peran kiai sebagai orang yang menguasai dan mengajarkan ilmu agama di pesantren kepada para santri. Kepemimpinan kiai di pesantren diakui cukup efektif untuk meningkatkan citra pesantren tersebut dimata masyarakat luas. Ketenaran pesantren biasanya berbanding lurus dengan nama besar kiai nya terutama kiai pendiri pesantren tersebut. Sosok kiai di pesantren tidak hanya selaku guru yang mengajarkan agama tetapi juga menjadi figur pemimpin yang mampu mengarahkan para santri dan pengikut atau pendukungnya dalam menempuh jalan hidup dan kehidupan mereka sehari – harinya. Kiai merupakan pemimpin sekaligus tokoh masyarakat yang menjadi panutan umat di lingkungan bahkan simptisan dan pendukung kiai bisa menembus batas wilayah pesantren.

Ulama dipandang sebagai sosok utama dan pewaris para Nabi, ketika tidak ada kemuliaan diatas kemuliaan Nabi berarti tidak ada pula kemuliaan yang melebihi ulama sepeninggal Nabi.¹⁵

Kiai merupakan sosok yang sangat istimewa dikalangan santri pada khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya. Karena kiai merupakan seseorang yang mempunyai kelebihan dalam ilmu agama dan sudah dipercaya untuk menjadi panutan dan tumpuan masyarakat dalam masalah-masalah agama karena gelar kiai atau ulama kepada seseorang bukan karena penyematan seperti

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Tamyiz Burhanudin, *Akhlak Pesantren* (Yogyakarta : ITTAQA Press, 2001) Hal : 69

pemberian gelar akademik ataupun gelar kehormatan, namun berdasarkan keistimewaan individunya yang dalam perspektif agama individu tersebut telah memiliki sifat kenabian (*warasthul ambia'*) seperti : kedalaman ilmu agama, amanah, wira'i, zuhud, thawadhu.¹⁶ Hal terpenting bagi santri adalah membuktikan dan berusaha agar selalu mematuhi apa yang dikatakan dan dilakukan kiai tanpa ada pertentangan karena fanatisme mereka terhadap kiai yang mereka anggap sebagai guru atau orang tua, karena itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan santri agar ilmu yang diperoleh santri dari kiai bermanfaat di masyarakat dan mendapatkan predikat sebagai santri yang baik.

Ketokohan kiai merupakan ciri khas dalam masyarakat pesantren, ini terjadi karena kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik, tapi karena keistimewaan tersebut individu kiai sendiri merupakan gelar yang tercipta melalui proses teologis. Menurut asal-usulnya perkataan kiai dalam bahasa jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda :

- a. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap kramat, umpamanya; "kiai garuda kencana" dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di Kraton Yogyakarta.
- b. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- c. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau yang menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. Selain gelar kiai,

¹⁶ Hamdan Farchan S, *Titik Tengkar Pesantren* (Yogyakarta : Pilar Religia, 2005) Hal : 65.

ia juga disebut dengan orang alim (orang yang dalam pengetahuan keIslamanya).¹⁷

E. Definisi Konsepsional

Ada beberapa konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain;

1. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam pemerintahan berdasarkan kesadaran sendiri guna mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik
2. Pemilu legislatif adalah orang yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pesantren adalah lembaga pendidikan agama yang didalamnya terdapat santri dan pengurus pesantren yang tinggal didalam pesantren.
Santri adalah masyarakat Islam yang belajar bersama dan menjalani hidup bersama pula.
Kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. "Kiai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren".

F. Definisi Operasional

Berdasarkan konsep yang diperkenalkan oleh Jeffrey M. Paige, terdapat tiga variable yang membentuk sebuah perilaku atau partisipasi politik seseorang,

¹⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta : LP3ES, 1985) Hal : 55

yakni: *independent variable*, *intervening variable*, dan *dependent variable*. Dalam penelitian ini yang menjadi *independent variable* adalah pengaruh politik kiai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun *dependent variable* dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran partisipasi politik santri pada pemilu, dan sikap apatis Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Santri Terhadap Parpol dan Kader Parpol, sedangkan yang menjadi *intervening variable* dalam penelitian ini adalah faktor non teknis yaitu tidak adanya pendataan calon pemilih di KPUD Yogyakarta yang valid. Berikut indikator-indikatornya :

1. Tidak ada anjuran dari kiai
2. Rendahnya kesadaran partisipasi politik santri pada pemilu
3. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Santri Terhadap Parpol dan Kader Parpol
4. Faktor administratif

G. Metode Penelitian

Penelitian sosiologis bukanlah pengungkapan sebuah cerita atau narasi yang mengungkap suatu fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan dimana peristiwa itu terjadi dengan pengungkapan yang deskriptif naratif, akan tetapi lebih dari itu penelitian diarahkan pada pengungkapan fenomena sosial yang mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungan, dan konteks sosiologisnya secara mendalam, atau sesuai dengan arus perkembangan metodologi ilmu sosial yang deskriptif analitis sehingga dengan kemampuan interpretasinya dapat menganalisa fenomena sosial.

Dari latar belakang diatas maka penelitian ini cenderung menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus, dalam bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia didalamnya. Studi kasus dapat dilakukan terhadap individu, segolongan manusia, lingkungan hidup manusia atau lembaga sosial.¹⁸ Atau juga dapat mengenai perkembangan yang ada. Hal ini dimaksud agar memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial yang unik dan jarang ditemui dalam komunitas lain. Dengan cara memperoleh sumber-sumber seperti laporan hasil pengamatan, catatan pribadi, buku harian atau biografi orang atau subjek yang diteliti, laporan atau keterangan dari orang yang banyak tahu tentang hal itu.¹⁹

Menurut Robert K. Yin metode studi kasus digunakan bila terdapat fenomena kehidupan nyata yang kontemporer dimana konteks dan fenomena tidak tampak dengan jelas sehingga sulit untuk dikontrol atau secara teknis, metode studi kasus digunakan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” yang diarahkan pada serangkaian peristiwa kontemporer, dimana penelitiannya hanya memiliki peluang yang kecil untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa tersebut.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yakni penelitian yang obyeknya peristiwa faktual yang ada dilapangan, dengan cara memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi

¹⁸ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2001) Hal : 27

¹⁹ *Ibid.* Hal : 28

²⁰ Robert K. Yin, *Studi Kasus* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006) Hal : 13

responden.²¹ Dalam hal ini penelitian difokuskan di pondok pesantren Krapyak, Kec. Sewon, Kab. Bantul Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif, karena dari penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai perilaku masyarakat santri di pondok pesantren Krapyak Kec. Sewon Bantul, Yogyakarta. Analitik, karena dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri atas dua kategori, yaitu sebagai berikut :

a. *Data Primer*, yaitu mendapatkan data ditangan pertama²² di pondok pesantren Krapyak Kec. Sewon Bantul, Yogyakarta.

b. *Data Sekunder*, yaitu karya-karya yang relevan dengan studi ini, mencakup buku-buku, jurnal, ensiklopedi, maupun artikel-artikel dari media massa yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.²³

²¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003) Hal : 31

²² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003) Hal : 58

²³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1998) Hal : 150.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang mendukung penyusunan skripsi ini, maka ditempuh dengan menggunakan tiga metode sebagai berikut :

a. *Wawancara*, yakni suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi.²⁴ Wawancara harus dilaksanakan dengan efektif, artinya dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh dari sebanyak-banyaknya. Bahasa harus jelas dan terarah agar data yang diperoleh data yang objektif dan dapat dipercaya.²⁵

Dalam hal ini sebagai subjek penelitian adalah para santri dan kiai, serta pihak lain yang sekiranya dapat memberikan input data yang signifikan. Upaya ini untuk ditempuh guna mendapatkan data primer dengan nilai validitas tinggi.

b. *Dokumentasi*, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁶ Data ini dapat berupa arsip salinan dan berkas-berkas yang berupa mencakup buku-buku, jurnal, ensiklopedi, maupun artikel-artikel dari media massa yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.²⁷

²⁴ *Ibid.* Hal : 306.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002) Hal : 203

²⁶ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003) Hal : 73.

²⁷ Imam Suprayoga dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung : PPT Rosda, 2001) Hal : 191.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil populasi masyarakat santri di pondok pesantren Krapyak, Dusun Krapyak Kulon, Kec. Sewon, Kab. Bantul Yogyakarta, dimaksud karena lingkungan ini sudah dikenali oleh peneliti, juga pengamatan diupayakan dapat berperan serta (*participant observation*) agar penyaringan data lebih memungkinkan dan optimal, disamping itu juga peneliti adalah bagian dari masyarakat kasus sehingga dapat berempati dengan kenyataan yang akan diteliti.